

**PENGARUH OPINI AUDIT DAN KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI  
PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN  
DAN KOTA DI PULAU JAWA)**

Sucahyo Heriningsih<sup>1</sup>  
Marita<sup>2</sup>

***Abstract:** Effect of Audit Opinion and Financial Performance of Local Government Corruption of Local Government (Empirical Study on the District and in the City of Java). This research aimed to find the empirical evidence of the effect of audit opinion and local government financial performance to the corruption level in the cities and regencies within Java region between 2008-2010 period. The independent variable which was the audit opinion were measured by the audit opinion of The Audit Board of Republic of Indonesia, while local government financial performance were measured by financial ratio (independency ratio, activity ratio and growth) within the local government revenues and budget plan (APBD). The dependent variable, the level of corruption were measured by the corruption perception index (IPK) provided by Indonesian Institute of Transparency. The sample of this research consist of 13 cities and regencies which have the corruption perception index within the 2008-2010 period. The result of this research statistically show the evidence that the audit opinion and the financial performance have no effect to the corruption level in Java region.*

**Abstrak:** Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). Penelitian bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh opini audit dan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi di yang terjadi di Kota dan Kabupaten di Pulau Jawa Periode 2008-2010. Variabel Independen opini audit diukur dengan menggunakan opini audit BPK, sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan rasio keuangan APBD (rasio kemandirian, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan). Variabel dependen tingkat korupsi yang diukur dengan menggunakan indeks persepsi korupsi (IPK) yang di keluarkan oleh lembaga transparansi Indonesia. Sampel penelitian terdiri dari 13 kota dan kabupaten yang memiliki indeks persepsi korupsi, dengan menggunakan data tahun 2008 dan 2010. Hasil pengujian secara statistik membuktikan bahwa variabel opini audit dan kinerja keuangan (rasio kemandirian, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Pulau Jawa.

**Kata Kunci:** opini audit, kinerja keuangan pemerintah daerah, tingkat korupsi.

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, email: heriningsih\_s@yahoo.co.id

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

## PENDAHULUAN

Fenomena korupsi yang banyak terjadi di Indonesia dalam era reformasi, hal ini menyebabkan semakin kecilnya kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan daerah. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Desentralisasi dan otonomi daerah membawa implikasi pada terjadinya pergeseran kekuasaan pusat ke daerah dan antar lembaga di daerah. Fenomena korupsi di daerah yang semakin terbuka, terjadi karena terdapat perbedaan atau ketidak konsistensian peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. *Money politics* merupakan salah satu bentuk terjadinya korupsi, kolosi, dan Nepotisme (KKN) di daerah. Otonomi daerah pada dasarnya di berikan kepada daerah agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah untuk tercapainya *good governance*. (Mardiasmo, 2009). Namun menurut Rinaldi, Purnomo, dan Damayanti (2007) sejak diberlakukannya otonomi otonomi daerah berdasarkan UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah di tahun 2001 telah terjadi kecenderungan korupsi di pemerintah daerah yang meningkat.

Terciptanya suatu pemerintah daerah yang akuntabel menjadi suatu harapan tersendiri bagi masyarakat, sehingga tercipta suatu sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas pada organisasi sektor publik, mempunyai arti bahwa pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent*.

Menurut Lane (2000) dalam organisasi publik, teori keagenan dapat juga diterapkan. Dari konsep teori keagenan inilah bisa terjadi *information asymmetry* antara pihak pemerintah (*agent*) yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak masyarakat (*principal*). Karena terjadi *information asymmetry* bisa menyebabkan terjadinya korupsi atau penyelewengan oleh *agent* (pemerintah). Untuk menghindari terjadinya korupsi di pemerintahan daerah, maka pengelolaan pemerintah daerah harus akuntabel dan diperlukan sistem pengawasan yang handal. Dengan terciptanya pemerintah daerah yang akuntabel berarti semakin sedikit terjadinya permasalahan *information asymmetry*, sehingga semakin sedikit peluang terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh pihak pemerintah daerah (*agent*).

LKPD menggambarkan tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk selalu dilakukan audit atas LKPD oleh pihak independent (BPK RI). Laporan hasil audit oleh BPK RI dapat berupa opini auditor, dimana terdapat empat jenis pendapat auditor (BPK). Apabila opini auditor *unqualified opinion* maka menunjukkan akuntabilitas suatu pemerintah daerah semakin bagus dan diharapkan akan mengurangi terjadinya korupsi. Sedangkan jika opini *qualified opinion*, *adverse opinion*, dan *disclaimer opinion*, maka masih ada kemungkinan terjadi salah saji yang material sehingga dapat juga mengindikasikan bisa terjadi korupsi. Penilaian kinerja suatu pemerintah daerah tidak hanya bisa dilihat dari hasil audit BPK, namun bisa juga di nilai dari kinerja keuangannya dengan berdasarkan rasio keuangan pada APBD. Dengan menggunakan rasio keuangan APBD dapat terlihat tingkat kemandirian, tingkat aktivitas, dan tingkat pertumbuhan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dari periode ke periode berikutnya.

Apabila dikaitkan dengan tingkat korupsi yang mungkin terjadi di pemerintah daerah maka bila rasio kemandirian suatu daerah bagus/tinggi maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan restribusi daerah yang akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, dengan demikian seharusnya tidak terjadi korupsi. Demikian juga dengan rasio aktivitas maupun rasio pertumbuhan, jika rasio aktivitas maupun rasio pertumbuhan bagus maka terjadi peningkatan sumber-sumber pendapatan di daerah yang tentu saja kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, dan seharusnya tidak terjadi korupsi. Semakin baik terciptanya transparansi dan akuntabilitas diyakini dapat mengurangi praktek korupsi di pemerintah daerah. Semakin baik akuntabilitas keuangan pemerintah, maka korupsi yang terjadi di daerah harapannya semakin berkurang. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Setiawan (2012) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah (opini audit, kelemahan Sistem pengendalian intern, dan ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

Maraknya kasus korupsi yang tidak hanya terjadi di sector bisnis, tetapi banyak juga dilakukan oleh para birokrat, menjadikan fenomena yang menarik untuk diteliti. Pulau Jawa yang terkenal dengan kota dan kabupaten yang cenderung lebih maju dibandingkan di luar Jawa baik di sektor ekonomi, infrastruktur dan pendidikan serta kecenderungan para birokratnya memiliki tingkat intelektual yang bagus, serta dengan budaya jawa seperti “budaya nrimo” yang kental dengan unsur etika, harapannya kasus korupsi tidak mungkin terjadi di Pulau Jawa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah opini audit dan kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat korupsi yang terjadi di Kota dan Kabupaten di Pulau Jawa?”

Fenomena korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah yang terjadi di Indonesia dalam era reformasi menyebabkan semakin kecilnya kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah daerah. Sejak tahun 2005 lembaga transparansi Indonesia melakukan survey terkait dengan korupsi yang terjadi di daerah. Nilai dari indeks ini sedang didebatkan, karena berdasarkan survei, hasilnya tidak bisa dihindarkan dari bersifat subyektif. Juga, apa yang didefinisikan atau dianggap sah sebagai korupsi berbeda-beda di berbagai wilayah hukum: sumbangan politis sah di satu wilayah hukum mungkin tidak sah di wilayah lain; sesuatu yang dianggap sebagai pemberian tip biasa di satu daerah bisa dianggap sebagai penyogokan di daerah lain. Dengan demikian, hasil survei harus dimengerti secara khusus sebagai pengukuran persepsi (anggapan) publik, bukannya satu ukuran yang obyektif terhadap korupsi. Dalam arti yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.

Desentralisasi dan otonomi daerah membawa implikasi pada terjadinya pergeseran relasi kekuasaan pusat–daerah dan antar lembaga di daerah. Berbagai perubahan membuka peluang maraknya ‘*money politics*’ oleh kepala daerah untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan dari legislatif, pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan oleh anggota legislatif sebagai setoran bagi partai politik serta–yang paling umum, adalah keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Peluang korupsi semakin terbuka dengan adanya perbedaan/inkonsistensi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, ‘kerjasama’ antara legislatif dan eksekutif serta minimnya porsi partisipasi dan pengawasan publik. (Rinaldi, at all, 2007)

Badan Pengawas Keuangan “BPK RI” bertugas mengawasi/memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan baik di pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat, atau lembaga-lembaga Negara lainnya yang mengelola keuangan Negara. Hasil audit BPK dapat berwujud Laporan Hasil Pemeriksaan

yang mencerminkan tingkat akuntabilitas suatu laporan pemerintah daerah (LKPD). Opini auditor merupakan point penting akan hasil audit dari auditor.

Terdapat empat opini yang dikeluarkan oleh BPK RI, yaitu *unqualified* (wajar tanpa pengecualian/WTP), *qualified* (wajar dengan pengecualian/ WDP), *adverse* (tidak wajar /TW), dan *disclamer* (tidak memberikan pendapat/TMP). Dari keempat opini tersebut opini terbagus adalah *unqualified* yang berarti bahwa laporan LKPD telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi laporan keuangan bisa digunakan oleh pemakai laporan keuangan. Sedangkan opini terjelek adalah tidak wajar karena informasi laporan keuangan (LKPD) tidak diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi dalam laporan keuangan tidak dapat dipakai oleh penggunanya. Dan berbeda dengan *disclamer* terjadi bila auditor menolak memberikan pendapat, kondisi ini disebabkan karena lingkup audit yang dibatasi atau karena laporan keuangan tidak dapat diaudit sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan Negara (SPKN), sehingga baik opini *adverse* maupun *disclaimer* tidak dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan jika opini audit bagus maka terdapat hubungan terbalik terhadap tingkat korupsi di daerah. Hasil penelitian Setawan (2012) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Dengan demikian terdapat ketidak konsistenan hasil dengan teori.

Dari penjelasan keterkaitan korupsi dengan opini audit maka dapat di hipotesiskan:

H1: Terdapat pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Untuk menciptakan transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, dalam pengelolaan keuangan daerah maka diperlukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Mardiasmo,2009). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

**Rasio kemandirian keuangan daerah** menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga semakin tinggi rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya, dan semakin bagus kinerja pemerintah daerahnya. Untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang telah di targetkan. IPK (indeks persepsi korupsi antara 0-10) yang merupakan gambaran asumsi masyarakat terhadap korupsi di daerahnya, hasil survey yang di lakukan oleh lembaga transparansi Indonesia. Dari angka IPK dapat di nyatakan bahwa semakin tinggi IPK maka kinerja pemerintah semakin baik, atau sedikit tingkat korupsinya. Rasio kemandirian berhubungan negatif dengan tingkat korupsi pemerintah daerah, atau bisa di katakan rasio kemandirian berhubungan positif dengan Indeks persepsi korupsi.

**Rasio Aktivitas (Halim, 2008)** menunjukkan kinerja pemerintah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi alokasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti belanja investasi/pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Sehingga semakin tinggi rasio aktivitas semakin bagus kinerja pemerintah daerah, sehingga berbanding terbalik dengan tingkat korupsi, atau rasio aktivitas berhubungan positif dengan Indeks persepsi korupsi.

**Rasio Pertumbuhan** digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di

capai dari periode-periode berikutnya. Rasio pertumbuhan bagus maka kesejahteraan masyarakat juga bagus sehingga menunjukkan semakin bagus kinerja pemerintah daerah dalam mendorong penerimaan PAD, sehingga berhubungan negative terhadap tingkat korupsi, atau rasio pertumbuhan berhubungan positif dengan indeks persepsi korupsi. Penelitian tentang Kinerja anggaran dengan menggunakan indikator rasio keuangan telah banyak dilakukan antara lain: Nugraheni (2007), Ekawarna, et all (2009), Susantih,et all (2009) namun penelitian tersebut belum menghubungkan dengan tingkat korupsi.

Dari penjelasan keterkaitan korupsi dengan kinerja pemerintah daerah maka dapat di hipotesiskan:

H2: Terdapat pengaruh rasio kemandirian terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah.

H3: Terdapat pengaruh rasio aktivitas terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah.

H4: Terdapat pengaruh rasio pertumbuhan terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari BPS Indonesia, sedangkan data tentang tingkat korupsi di pemerintah daerah di ambil dari situs <http://www.ipkindonesia.org>. Berikut ini tabel pemilihan sampel sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Pemilihan Sampel**

Populasi: total jumlah kabupaten dan kota	484 kabupaten dan kota
Kota dan kabupeten yang memiliki indeks persepsi korupsi	50 kabupaten dan kota
Sampel kabupaten dan kota di pulau Jawa yang memiliki indeks persepsi korupsi selama tahun 2008-2010, serta data tersedia lengkap dari BPK dan BPS	13 kabupaten dan kota
Jumlah sampel yang di observasi	26 kabupaten dan kota

Opini Audit merupakan variabel Independen yang diukur menggunakan variabel dummy. Laporan audit Independen merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, opini auditor yang merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria Standar akuntansi Pemerintah. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy* , Kategori *unqualified* yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*) diberi nilai *dummy* 1 dan kategori *non unqualified* yang terdiri dari Wajar dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*), Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*) diberi nilai *dummy* 0

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan variabel independen yang diukur dengan menggunakan 3 rasio keuangan APBD yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan, dimana ketiga rasio tersebut merupakan rasio pengukuran kinerja pemerintah.

### a. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerah dengan

demikian rasio ini berkorelasi positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: (Mahmudi, 2011)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{(\text{Transfer pusat} + \text{propinsi}) + \text{pinjaman}} \times 100\%$$

**b. Rasio Aktivitas**

Rasio aktivitas yang digunakan dengan rasio ini membandingkan total belanja rutin terhadap total APBD, hal ini menggambarkan prioritas alokasi dana pada belanja rutin atau kah belanja pembangunan. (Halim, 2009)

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total belanja rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

**c. Rasio Pertumbuhan**

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan daerah dalam miningkatkan keberhasilan yang telah dicapai. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing kelompok sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi yang mendapat perhatian.

$$\text{Rasio pertumbuhan pendapatan} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

**Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi pemerintah daerah. Tingkat korupsi yang terjadi di suatu pemerintahan daerah secara tepat sulit diketahui. Hal ini terjadi karena sifat asal dari korupsi adalah tindakan yang tersembunyi. Tingkat korupsi yang dipakai dalam penelitian ini adalah memodifikasi angka indeks persepsi korupsi yang di terbitkan oleh Lembaga Transparansi Internasional Indonesia. IPK diterbitkan setiap 2 tahun sekali.

1= angka indek minimal berarti tingkat korupsi daerah banyak terjadi

10 = angka indek maksimal yang berarti tingkat korupsi di daerah sedikit yang terjadi

Berdasarkan angka indeks tersebut maka dapat di asumsikan bahwa jika IPK=1 dapat diasumsikan tingkat korupsi (TK=10), atau sebaliknya jika IPK=10 maka dapat diasumsikan tingkat korupsinya (TK=1)

**ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis data penelitian akan diuraikan dengan statistik deskriptif. Hasil analisis deskriptif variabel penelitian disajikan tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tkorupsi	26	3.57	6.68	5.2888	.86363
OPINI	26	.00	1.00	.0769	.27175
RK	26	.02	1.24	.2442	.31094
RBR	26	.67	1.94	1.3277	.54853
RBP	26	.06	.36	.1723	.08534
RT	26	-.87	10.31	.5508	2.03020
Valid N (listwise)	26				

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 2. statistik deskriptif di atas maka dapat di simpulkan bahwa: Untuk variabel tingkat korupsi nilai rata-ratanya 5,2888 sedangkan nilai maksimum 6,68 dan minimum 3,57 yang berarti bahwa, dari sampel kota dan kabupaten yang di pakai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi rata-rata masih relatif tinggi.

Variabel opini audit nilai rata-rata menunjukkan 0,0769, sedangkan apabila dilihat dari data 26 kota dan kabupaten yang memiliki opini audit wajar tanpa pengecualian hanya dua kabupaten yang memiliki opini wajar tanpa pengecualian, hal ini berarti bahwa dari sampel kota dan kabupaten yang di ambil sebagai sampel maka masih banyak kota dan kabupaten di Pulau Jawa yang belum mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Variabel rasio kemandirian menunjukkan nilai rata-rata 0,2442 berdasarkan angka rata-rata maka tingkat kemandirian di kota dan kabupaten menunjukkan masih pada tingkat yang rendah, karena masih di bawah angka 1 yang berarti rata-rata nilai PAD masih di bawah total nilai transfer pusat, propinsi dan pinjaman, hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian suatu daerah rata-rata masih tergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, sedangkan berdasarkan angka dari data mentahnya menunjukkan bahwa tingkat kemandirian di kota dan di kabupaten yang memiliki angka di atas 1 (angka PAD melebihi total nilai transfer pusat, propinsi dan pinjaman) hanya 2 kota saja.

Variabel rasio aktivitas di ukur dengan membandingkan antara rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan. Nilai rata-rata dari rasio belanja rutin menunjukkan angka 1,3277 dengan nilai minimum 0,67 dan nilai maksimum 1,94, sedangkan nilai rata-rata belanja pembangunan menunjukkan 0,1723 dengan nilai minimum 0.06 dan nilai maksimum 0,36. Dengan demikian maka rasio belanja rutin lebih besar jika di bandingkan rasio belanja pembangunan, hal ini berarti bahwa alokasi dana lebih banyak pada belanja rutin.

**Tabel 3**  
**Data Variabel Penelitian**

		Tingkat Korupsi		Opini		Rasio Kemandirian		Rasio Belanja Rutin		Rasio Belanja Pembangunan		Rasio Pertumbuhan Pendapatan	
		2008	2010	2008	2010	2008	2010	2008	2010	2008	2010	2008	2010
1	Jakarta	5.94	5.57	0	0	1.24	1.15	0.75	1.72	0.25	0.28	-0.87	0.20
2	Cirebon	6.18	6.39	0	0	0.08	0.13	0.89	1.91	0.11	0.09	0.11	1.33
3	Tasikmalaya	4.88	6.06	0	0	0.02	0.08	0.84	1.91	0.16	0.09	0.06	0.27
4	Bandung	6.33	4.96	0	0	0.11	0.12	0.87	1.85	0.13	0.15	-0.25	-0.07
5	Puwokerto	6.46	4.94	0	0	0.12	0.08	0.86	1.93	0.14	0.07	0.11	-0.20
6	Tegal	6.68	3.74	0	0	0.08	0.10	0.78	1.90	0.22	0.10	0.14	1.23
7	Semarang	5.45	5	0	0	0.40	0.48	0.78	1.92	0.22	0.08	0.12	10.31
8	Yogyakarta	3.57	4.19	0	1	0.24	0.36	0.87	1.93	0.13	0.07	0.26	0.16
9	Surakarta	4.65	4	0	1	0.19	0.23	0.78	1.84	0.22	0.16	0.16	0.18
10	Malang	5	5.85	0	0	0.08	0.11	0.78	1.87	0.22	0.13	0.22	0.17
11	Jember	5.04	5.29	0	0	0.09	0.13	0.79	1.94	0.21	0.06	0.15	0.15
12	Kediri	5.1	4.44	0	0	0.07	0.07	0.68	1.82	0.32	0.18	0.07	0.07
13	Surabaya	5.74	6.06	0	0	0.54	0.05	0.67	1.64	0.33	0.36	0.10	0.14

Variabel rasio pertumbuhan nilai rata-rata 0,5508 dan nilai minimum -0,87 dan nilai maksimum 10,31, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam meningkatkan keberhasilan daerah yang telah di capai masih terdapat daerah yang memperoleh rasio negative, yang berarti penerimaan pendapatannya masih belum terdapat peningkatan dari tahun ke tahun.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu di dilakukan uji asumsi klasik atas variabel-variabel di teliti, dan hasil dari uji asumsi klasik semua lolos sehingga model regresi terbebas dari bias.

Hasil pengujian regresi berganda yang terdapat dalam tabel 5.8 berikut ini: Berdasarkan tabel 4, maka persamaan regresi berganda yang di hasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,394 - 1,255 \text{ Opini} + 0,230 \text{ RK} - 0,078 \text{ RBR} + 0,365 \text{ RBP} - 0,044 \text{ RT}$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat di interpretasikan bahwa jika opini auditor, rasio kemandirian, rasio belanja rutin, rasio belanja pembangunan, dan rasio pertumbuhan pendapatan bernilai 0, maka tingkat korupsi mencapai 5,394%. Sedangkan untuk koefisien regresi opini auditor bernilai 1, 255 berarti jika opini auditor akan naik 1% maka tingkat korupsi akan turun sebesar 1,255%.

Untuk koefisien regresi rasio kemandirian bernilai 0,230 berarti jika rasio kemandirian akan naik 1% maka tingkat korupsi akan naik sebesar 0,230 %. Untuk koefisien regresi rasio belanja rutin bernilai 0,078 berarti jika rasio belanja rutin naik 1% maka tingkat korupsi akan turun sebesar 0,078%. Untuk koefisien regresi rasio belanja pembangunan bernilai 0,365 berarti jika rasio belanja pembangunan naik 1% maka tingkat korupsi akan naik sebesar 0,365. Sedangkan untuk koefisien rasio pertumbuhan pendapatan bernilai -0,044 berarti jika rasio pertumbuhan pendapatan naik 1% maka tingkat korupsi akan turun sebesar 0,044, hal ini berlaku jika variabel bebas yang lain konstan.

**Tabel 4**  
**Hasil Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5.394	.803		6.719	.000
	OPINI	-1.255	.684	-.395	-1.835	.081
	RK	.230	.601	.083	.383	.706
	RBR	-.078	.388	-.049	-.200	.844
	RBP	.365	2.560	.036	.143	.888
	RT	-.044	.093	-.104	-.477	.638

a. Dependent Variable: Tkorupsi

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.630	5	.726	.967	.461 <sup>a</sup>
	Residual	15.017	20	.751		
	Total	18.646	25			

a. Predictors: (Constant), RT, OPINI, RK, RBR, RBP

b. Dependent Variable: Tkorupsi

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk variabel opini auditor adalah sebesar 0,81, karena di atas di bawah 0,05 maka H1 ditolak. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh opini auditor terhadap tingkat korupsi di daerah terutama di Pulau Jawa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bisa saja opini bagus (wajar tanpa pengecualian /WTP) belum tentu terbebas dari adanya kasus korupsi di dalam suatu entitas tersebut.

Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan memberikan opini sesuai dengan hasil laporan tersebut. Opini auditor sering dijadikan sebagai pengukuran kinerja suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya yang berasal dari pihak eksternal, sehingga seringkali terdapat gejala di daerah terkesan memburu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian menyatakan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di daerah, hal ini dapat dikatakan bahwa baik opini auditor WTP atau pun disclaimer sekalipun masih banyak terindikasi adanya korupsi di daerah tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Setiawan (2012). Nilai probabilitas dari variabel Rasio Kemandirian sebesar 0,706 yang berarti lebih besar 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang ke 2 di tolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di daerah pulau jawa.

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian tidak mempengaruhi tingkat korupsi di daerah, sehingga dapat

diinterpretasikan bahwa walaupun suatu daerah memiliki rasio kemandirian yang tinggi maupun rendah tetap saja tingkat korupsi bisa terjadi di suatu daerah tersebut.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel rasio aktivitas dalam hal ini diukur dengan menggunakan rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan dengan yang memiliki nilai probabilitas 0,844 dan 0,888 maka ke dua-duanya memiliki nilai probabilitas di atas 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa Rasio aktivitas tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Pulau Jawa.

Kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio aktivitas (rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan) digunakan untuk menilai bahwa kinerja pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi ke belanja rutin atau belanja pembangunan. Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa baik rasio belanja rutin maupun rasio belanja pembangunan tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di daerah. Hal ini berarti bahwa baik prioritas belanja daerah pada belanja rutin ataupun belanja pembangunan, serta jika rasio aktivitasnya bagus atau tidak bagus pun tidak mengindikasikan suatu laporan keuangan pemerintah daerah terbebas dari korupsi.

Hasil uji t menunjukkan nilai probabilitas dari variabel rasio pertumbuhan adalah 0,368 artinya di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa, variabel rasio pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pulau Jawa.

Rasio pertumbuhan menjadi salah satu indikator pengukuran kinerja keuangan, karena dengan mengetahui tingkat pertumbuhan suatu daerah maka dapat mengetahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari periode-periode berikutnya. Rasio pertumbuhan bagus maka kesejahteraan masyarakat juga bagus menunjukkan semakin bagus kinerja pemerintah daerah dalam mendorong penerimaan PAD.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel rasio pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi, sehingga dapat dinyatakan bahwa walaupun kinerja keuangan yang diukur dengan rasio pertumbuhan menunjukkan rasio tinggi ataupun rendah tetap berindikasi untuk tetap terjadi korupsi di pemerintahan daerah.

Ketiga pengukuran kinerja keuangan (rasio kemandirian, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan) ketiga-tiganya menunjukkan tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi, pengujian hipotesis ini sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti, sehingga belum terlihat adanya konsistensi dari penelitian sebelumnya.

Hasil uji F ini digunakan untuk mendukung analisis dalam pengujian hipotesis 1, 2, 3, dan 4. Apabila nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 ( $p < 0,05$ ) maka model regresi signifikan secara statistik. Hasil analisis regresi berganda untuk nilai probabilitas sebesar 0,461 yang berarti lebih besar dari 0,05 dengan demikian secara simultanpun variabel opini auditor, rasio kemandirian, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji F pun menunjukkan bahwa ke empat variabel tidak mendukung hipotesa penelitian, bahwa variabel opini auditor, rasio kemandirian, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pulau Jawa.

Koefisien determinasi untuk mengukur besarnya persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1, semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen, demikian juga sebaliknya.

**Tabel 5**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.441 <sup>a</sup>	.195	-.007	.86651

a. Predictors: (Constant), RT, OPINI, RK, RBR, RBP

Tabel 5 berikut ini menunjukkan bahwa besarnya nilai *R square* sebesar 0,195 hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di pulau Jawa dipengaruhi oleh opini auditor, rasio kemandirian, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan sebesar 19,5%, sedangkan sisanya 80,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Penilaian kinerja pemerintah daerah dapat menggunakan opini audit yang dikeluarkan oleh BPK, selain itu ukuran lain untuk menilai kinerja pemerintah adalah dengan menilai kinerja keuangannya. Kinerja keuangan pemerintah dalam penelitian ini diukur dengan analisa rasio APBD (rasio kemandirian, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan). Hasil pengujian secara statistik membuktikan bahwa opini auditor, dan kinerja keuangan (rasio kemandirian, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa walaupun opini audit maupun kinerja keuangan bagus, masih perlu waspada bahwa terdapat kemungkinan terjadinya korupsi dalam pemerintahan daerahnya.

Penelitian ini menarik untuk di teliti lebih lanjut dalam lingkup geografi penelitian yang lebih luas misalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga bisa lebih di generalisir hasilnya. Penelitian berikutnya bisa dilakukan dengan menambahkan, mengurangi ataupun mengganti variabel-variabel penelitian yang dimungkinkan relevan dengan kondisi di Indonesia. Hasil penelitian ini bagi pemerintah maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dapat digunakan sebagai masukan, bahwa kinerja pemerintah dalam hal opini auditor maupun kinerja keuangan yang bagus pun, masih perlu waspada akan adanya tindakan korupsi di pemerintah daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dest, Yamane. (2006). *Designing Anti-Corruption Strategies for Developing Countries A Country Study of Eritrea*. Journal of Developing Societies, Vol.22, No.4.
- Dollery. B. E, and Grant. B, (2011), *Economic Efficiency versus Local Democracy? A Evaluation of Structural Change and Local Democracy in Australian Local Government*, Journal of Interdisciplinary Economics.
- Department of Local Government and Planning, (2011), *Financial management (sustainability) Guideline*, Australia
- Ekawarna.Sinta U., Iskandar Sam, dan Sri Rahayu. (2009). *Pengukuran kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Pemerintah daera Kabupaten Muaro Jambi*. Jurnal Cakrawala Akuntansi, Vol. 1.No.1.

- Geys. Benny, Friedrich. Heinemann, Alexander Kalb, (2007), *Value for money? Measuring German Lokal Government Efficiency. Proceedings Conference Governace research unit*, Berlin, Germany.
- Guthrie. J, (1998), *Application of Accrual Accounting in the Australian Public Sector – hetoric or Reality? Financial Accountability and Management*, Februari, Vol. 14 No. 1.
- Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Heriningsih, Sucahyo., (2011), *Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Study Kasus di Yogyakarta)*, Belum Terpublikasi.
- Hughes, O. E., (1998), *Public Management and Administration*. 2nd Ed., London: MacMillan Press Ltd.
- Jackson, Peter M. (Editor). (1995). *Measures for Success in the Public Sector: A Public Finance Foundation Reader. Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)*.
- Jones, Rowan & Pendlebury, Mourice, (2000), *Public Sector Accounting*, 5<sup>th</sup> Ed. London: Financial Times- Prentice Hall.
- Lane, J.E. (2000). *NewPublic Management*. Routledge , London.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andy Offset:Yogyakarta.
- Nugrahani, Tri Siwi. (2007). *Analisis Penerapan Konsep Value For Money pada Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta*, AKmenika UPY, Vol. 1.
- Nurcholish, H. (2005). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rinaldi. Taufik., Marini Purnomo, dan Dewi Damayanti. (2007). *Memerangi korupsi di Indonesia yang terdesentralisasi : studi kasus penanganan korupsi pemerintah daerah*. Jakarta : Justice for the Poor Project, Bank Dunia.
- Setiawan, Wahyu. (2012). *Pengaruh Akuntabilitas laporan Keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi Pemerintah daerah di Indonesia*, Skripsi., Undip.
- Susantih,H.,dan Saftiana,Y. (2009). *Perbandingan indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi se-Sumatra Bagian Selatan*. Simposium Nasional Akuntansi ke-12.